

RESPONS FILIPINA TERHADAP PEMBANGUNAN PULAU BUATAN TIONGKOK DI WILAYAH LAUT TIONGKOK SELATAN (2022-2024)

Oleh: Wisnu Nur 'Alam Arasy

Pembimbing: Tuah Kalti Takwa, S.H, M.H

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

This research examines the impact of China's construction of artificial islands in the South China Sea region on diplomatic relations between China and the Philippines in the period 2022-2024. The reclamation project and the construction of military infrastructure in the area claimed by China have created geopolitical tensions, especially with countries that geographically and legally have legitimate claims under UNCLOS, such as the Philippines. These tensions have a direct impact on the dynamics of bilateral relations, especially in terms of security cooperation and regional political stability.

This research uses a qualitative approach with a case study method, and data collection techniques through literature study. In analysing the problem, this research utilises the theory of offensive realism as one of the main theories in the Neorealism perspective to understand the motives of China's power expansion, and the response of the Philippines as one of the consequences of said expansion.

The analysis shows that the construction of artificial islands has worsened Philippine-China diplomatic relations. While economic cooperation continues, political and defence aspects are experiencing increased friction, including through the strengthening of trilateral relations between the Philippines, the United States and Japan. This research provides an understanding that unilateral development of disputed territories can create regional instability and encourage changes in the foreign policy strategies of affected countries.

Keywords: *South China Sea, diplomacy, artificial islands, military activity, foreign policy*

PENDAHULUAN

Bertindak sebagai wilayah laut dengan sejumlah besar negara penggugat, Laut Tiongkok Selatan (LTS) telah menjadi wilayah laut yang memiliki kasus sengketa perbatasan yang rumit dan sulit untuk diselesaikan, sekaligus menjadi salah satu jalur perdagangan terpenting dalam perekonomian dunia, terutama bagi negara-negara Asia Timur termasuk Tiongkok.

Tiongkok melakukan kerja sama dengan negara-negara ASEAN dengan pembentukan *ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA) dalam menjalin kerja sama dengan ASEAN. Hal ini dikarenakan Tiongkok merupakan mitra dagang terbesar serta Sumber Investasi Asing (SIA) terbesar kedua untuk ASEAN,¹ namun tetap mengeluarkan klaim yang kontroversial atas wilayah LTS dengan Sembilan garis putus-putus mereka, yang dimana Filipina membawakan kasus ini ke proses arbitrase atas dasar *United Nations Convention of Law of the Sea* atau Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS).

Mengangkat isu-isu yang terkait dengan masalah Tiongkok seperti klaim historis mereka dalam bentuk Sembilan garis putus-putus, dengan *Permanent Court of Arbitration* (PCA) yang bertindak dalam proses pengadilan pada 2016, dan putusan pengadilan sangat

mendukung atas gugatan Filipina terhadap Tiongkok tidak dapat memiliki kendali eksklusif atas wilayah sembilan garis putus-putus serta landasan kontinen.²

LTS tidak hanya merupakan jalur perdagangan dunia yang vital, tetapi juga merupakan wilayah yang menyimpan cadangan sumber daya minyak dan gas yang besar. Dengan total luas 3,6 juta km², setidaknya terdapat lebih dari sepuluh cekungan minyak dan gas yang dapat mencakup 852.400 km² dari keseluruhan wilayah LTS.³ Estimasi potensi kekayaan yang terkandung di dalam LTS diperkirakan mencapai 11 miliar barel cadangan minyak, serta setidaknya 190 triliun kaki³ cadangan gas alam, dari laporan US EIA, sementara dari laporan Wood Mackenzie, memberikan estimasi setidaknya 2,5 miliar barel minyak dari cadangan migas yang telah terbukti.⁴

Tiongkok memiliki berbagai cara untuk mendapatkan legitimasi atas sebagian besar wilayah LTS. Mengubah kondisi fisik di sekitar LTS, terutama yang berbatasan dengan Filipina. Tiongkok telah melakukan setidaknya tujuh proyek reklamasi dan konstruksi

¹ ASEAN (2022). *ASEAN, China announce ACFTA upgrade*. <https://asean.org/asean-china-announce-acfta-upgrade/>. (Diakses pada 6 Mei 2024).

² *Permanent Court of Arbitration* (2016). *Press Release: The South China Sea Arbitration (The Republic of the Philippines vs The People's Republic of China)*. Den Hag. 8-9.

³ Kent, G., & Valencia, M. Mark (1985). *Oil and Gas Potential, Overlapping Claims, and Political relations*. University of California Press. Berkeley. Hal 159.

⁴ EIA (2013). *Overview: The South China Sea is a critical world trade route and a potential source of hydrocarbons, particularly natural gas, with competing claims of ownership over the sea and its resources*.

yang telah mengubah tujuh pulau karang termasuk *Mischief reef*, *Fiery Cross reef*, *Cuarteron reef*, *Gaven reef*, *Johnson reef*, *Hughes reef*, dan *Subi reef*. Tiongkok pada awalnya, membenarkan proyek tersebut sebagai kegiatan sipil, yang tidak dilarang oleh pengadilan dan menerima alasan Tiongkok, namun, ada tuduhan dari berbagai aktor negara dan non-negara bahwa Tiongkok telah memiliterisasi kepulauan tersebut, yang bertujuan untuk mengubah keseimbangan kekuatan di LTS.⁵

Tiongkok telah melakukan reklamasi di beberapa terumbu karang dan pulau-pulau kecil di sekitar kepulauan Spratly sejak akhir tahun 2013 untuk dijadikan fondasi bagi pulau-pulau buatan mereka. *Fiery Cross Reef* merupakan salah satu contoh hasil pembangunan pulau buatan Tiongkok di kepulauan Spratly yang sudah jauh melampaui batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Tiongkok. Setidaknya terdapat tujuh pulau buatan yang dibangun Tiongkok di ZEE Filipina seperti *Fiery Cross Reef*, *Subi Reef*, *Johnson Reef*, *Mischief Reef*, *Hughes Reef*, *Gaven, Reef*, dan *Cuarteron Reef*, yang pembangunannya dilakukan sejak tahun 2013.⁶

Filipina adalah salah satu negara

yang terkena dampak langsung dari tindakan Tiongkok selain Malaysia, dan Taiwan dalam masalah ini. Arbitrase tahun 2016 telah menjadi pelajaran tentang posisi dan kepentingan Tiongkok, terutama bagi negara-negara ASEAN yang menjadikan Tiongkok sebagai mitra ekonomi terbesarnya. Terdapat percepatan negosiasi *Code of Conduct* (COC) LTS yang substantif dan efektif dengan selesainya pedoman sebagai tambahan dari *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC),⁷ namun 0kerja sama tersebut masih terbatas pada kerja sama ekonomi.

Perubahan hubungan diplomasi antara dua negara yang diakibatkan oleh kasus ini salah satunya contohnya dapat dilihat dari Tindakan Filipina yang telah meminta bantuan militer asing, yaitu Amerika Serikat untuk membantu Filipina dalam meningkatkan keamanan wilayah laut mereka. Filipina telah membangun kerja sama *security triangle* dengan AS dan Jepang, dengan pengeluaran AS dalam kerja sama ini sebesar \$625 juta dari tahun 2018-2022.⁸ Filipina dan negara lainnya juga meningkatkan jumlah personnel militer yang melakukan patroli di perbatasan perairan mereka, dan bahkan telah

⁵ Beckman, R. (2017). *China's 'Island-Building' in the South China Sea: Implications for Regional Security*. Council for Security Cooperation in the Asia Pacific. 40-41.

⁶ Southerland, M. (2016). *China's Island building in the South China Sea: Damage to the marine Environment, Implications, and International Law*. U.S.-China Economic and Security Review Commission. 3.

⁷ Channel News Asia. *ASEAN, China Agree on guidelines to accelerate South China Sea code of conduct negotiations*. <https://www.channelnewsasia.com/asia/asean-china-south-china-sea-code-conduct-wang-yi-3626306> (Diakses pada 21 Mei 2024)

⁸ Poling, Gregory; Natalegawa, Andreyka; & Fallin, Danielle (2023). *Building a U.S.-Japan-Philippines Triad*. CSIS. <https://www.csis.org/analysis/building-us-japan-philippines-triad> (Diakses pada 8 Agustus 2024)

mendapatkan persetujuan kerja sama dengan Australia di atas kerja sama dengan Jepang dan AS untuk menangkai peningkatan agresi dari Tiongkok di wilayah LTS.⁹

Kompleksitas dari kasus di LTS yang telah melibatkan banyak negara dan organisasi dalam penanganannya, terutama terhadap negara-negara ASEAN yang saling menyuguhkan klaim mereka semenjak tahun 1950-an di kepulauan Spratly,¹⁰ dan masih terjadi sampai saat ini. Pembangunan pulau buatan serta peningkatan aktivitas militer di area sekitar semakin meningkatkan ketegangan dalam hubungan diplomasi antara Tiongkok dengan Filipina yang dapat mengakibatkan konflik besar di wilayah LTS, dengan harapan adanya rekonsiliasi antara kedua negara di masa depan.

KERANGKA TEORI

Teori Realisme Ofensif

Realisme Ofensif merupakan satu dari dua teori terpenting dalam Neorealisme, yang menurut John Mearsheimer, lebih menekankan pada kepercayaan bahwa sistem internasional memaksa negara-negara besar untuk mencari kekuatan baru karena hal tersebut dapat

memaksimalkan “keamanan mereka”, dan berbanding terbalik dengan Realisme Defensif yang dikemukakan oleh Kenneth Waltz, dimana sistem internasional tidak selalu menciptakan konflik dan perang, dan strategi bertahan merupakan jalan terbaik dalam mendapatkan keamanan.¹¹ Dibawakan oleh Mearsheimer pada bukunya yaitu *the Tragedy of Great Power Politics* yang dikeluarkan pada tahun 2001.

Dalam realisme ofensif, Mearsheimer juga menggunakan lima asumsi dasar yang dikemukakan oleh Kenneth Waltz layaknya sebagian besar realis kontemporer, yang pertama adalah sistem internasional bersifat anarkis, yang dimana tidak ada yang memerintahkan pemerintah-pemerintah negara. Kedua, negara tidak dapat mengetahui tujuan atau maksud dari negara lain secara pasti, dan apakah mereka akan menggunakan *power* mereka atau tidak. Ketiga, ketahanan dan kelangsungan hidup menjadi prioritas utama seluruh negara dalam sistem internasional.

Keempat, negara merupakan entitas yang rasional, dimana mereka dapat berpikir secara strategis dalam situasi eksternal mereka dan memilih strategi yang dapat memaksimalkan tujuan mereka dalam kelangsungan hidup. Terakhir Mearsheimer mengatakan bahwa negara selalu memiliki kapasitas militer yang dapat

⁹ Mercer, P. (2024). *Australia boosts Philippine military ties as South China Sea tensions rise*. VOA News. <https://www.voanews.com/a/australia-boosts-philippine-military-ties-as-south-china-sea-tensions-rise-/7598589.html> (Diakses pada 8 Agustus 2024)

¹⁰ Djelantik, S. (2015). *Asia Pasifik: Konflik, Kerja Sama, dan Relasi Antarkawasan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta. 144.

¹¹ Rudloff, Peter (2013). *Offensive Realism, Defensive Realism, and the Role of Constraints*. *Arkansas Political Science Association. The Midsouth Political Science Review*. 14. 45-46.

memberikan mereka kemampuan untuk menyerang negara lain maupun.¹² Mearsheimer juga memprediksi bagaimana naiknya Tiongkok sebagai kekuatan baru dalam dunia modern tidak akan berlangsung dengan damai, terutama bagaimana usaha mereka dalam kompetisi peningkatan keamanan dengan rival mereka.¹³

Teori ini sesuai untuk mendeskripsikan diplomasi luar negeri Tiongkok, terutama terhadap negara tetangga mereka, hingga memperkeruh hubungan diplomatik mereka terhadap negara-negara yang memiliki perbatasan laut dengan Tiongkok. Terlebih lagi tindakan Tiongkok yang berusaha mendapatkan kekuatan baru di wilayah LTS yang tidak hanya dapat memberikan keuntungan dalam SDA nya yang kaya, namun juga kedudukan yang superior dalam politik dunia dan keamanan negara yang kuat.

Menurut pandangan Mearsheimer, memaksimalkan kekuatan relatif terhadap titik dari hegemoni merupakan tujuan utama dari semua negara, dan hegemon di sini dapat diartikan sebagai 'sebuah negara yang sangat kuat, bahkan dapat mendominasi negara lain

dalam sistem', dan konsep tersebut dapat diterapkan secara global maupun regional.¹⁴ Walaupun hegemoni yang dimaksud oleh Mearsheimer di sini adalah dominasi terhadap suatu sistem, yang biasanya diintrepertasikan sebagai seluruh dunia, namun konsep dari sistem ini juga dapat dipersempit lagi dan dapat dimaksudkan sebagai suatu region seperti Eropa, Asia Tenggara, Timur Tengah, dan lain-lain.

Level Analisa

Terdapat tiga pembagian tingkatan analisis dalam hubungan internasional, individu, negara, dan sistem internasional. Dalam kasus ini, tingkat analisis berada di tingkatan negara hingga sistem internasional. Melihat interaksi ofensif dilakukan oleh satu negara yaitu Tiongkok, yang merambah pada negara-negara lain dan telah melewati perbatasan serta membentuk interaksi unik dalam menanggapi tindakan negara tersebut, maka tingkat analisis berada di tingkatan sistem internasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif, yang merupakan suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk memahami lebih lanjut suatu fenomena yang telah ataupun sedang dialami subjek penelitian. Hal yang dapat diteliti dapat berbentuk perilaku, persepsi, motivasi, dan lain sebagainya. Memandang bagaimana subjek yang

¹² Toft, P. (2005). *John J. Mearsheimer: An Offensive Realist Between Geopolitics and Power*. University of Copenhagen. Denmark. *Journal of International Relations and Development*. 8(4). Hal 383.

¹³ Mearsheimer, J.J. (2001). *The tragedy of great power politics*. New York: W.W. Norton & Company.

¹⁴ Toft. *Op..Cit.* 384.

akan diteliti merupakan subjek penelitian dengan interaksi antar aktor-aktor negara, serta situasi yang dihasilkan memiliki kompleksitas yang tinggi, sehingga dibutuhkan struktur yang lebih fleksibel dalam tulisan akhir nanti.

Menggunakan pendekatan studi kasus, yang bertujuan untuk mendalami subjek yang akan diteliti dan mencari gambaran dari situasi serta interaksi yang terjadi, dilakukan secara sistematis dari situasi yang terjadi dalam jangka waktu yang Panjang, melihat bagaimana secara historis, subjek ini sudah terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tiongkok mendasarkan klaimnya atas Laut Tiongkok Selatan pada beberapa justifikasi utama yang telah menjadi sumber perdebatan internasional selama beberapa dekade. Garis yang pertama kali diukir pada peta Tiongkok tahun 1947 ini dianggap "tidak memiliki dasar hukum" untuk klaim maritim menurut Mahkamah Arbitrase Permanen di Den Haag.¹⁵ Namun demikian, Beijing terus mempertahankan posisinya berdasarkan argumen historis dan kedaulatan.

Inti dari klaim Tiongkok adalah *nine-dash line* yang mencakup hampir seluruh wilayah Laut Tiongkok Selatan. Beijing mengklaim sebagian besar

wilayah tersebut dengan garis berbentuk U yang mencakup hingga 90 persen dari perairan ini.¹⁶ Tiongkok menggunakan tiga justifikasi utama: pertama, klaim historis yang menyatakan bahwa mereka telah menemukan dan menguasai pulau-pulau di kawasan tersebut sejak zaman kuno; kedua, kedaulatan atas fitur-fitur geografis seperti Kepulauan Spratly dan Paracel; dan ketiga, hak-hak historis atas sumber daya maritim di kawasan tersebut.

Menurut perspektif Tiongkok, klaim historis mereka atas wilayah dan area maritim di Laut Tiongkok Selatan didukung oleh sumber-sumber sejarah Tiongkok dan Barat yang melimpah.¹⁷ Tiongkok bahkan mengesahkan Undang-Undang tentang Laut Teritorial dan Zona Bersebelahan yang mengklaim seluruh Laut Tiongkok Selatan berdasarkan hak historis mereka sejak Dinasti Han Barat (200 SM hingga 9 M).¹⁸

Klaim Tiongkok berakar pada

¹⁵ TIME. (2016). *South China Sea: Where did China get its nine-dash line?* <https://time.com/4412191/nine-dash-line-9-south-china-sea/> (Diakses pada 29 April 2025)

¹⁶ The Print. (2020). *What is nine-dash line? The basis of China's claim to sovereignty over South China Sea.* <https://theprint.in/theprint-essential/what-is-nine-dash-line-the-basis-of-chinas-claim-to-sovereignty-over-south-china-sea/469403/> (Diakses pada 29 April 2025)

¹⁷ Institute for China-America Studies. (2020). *Historical evidence is indispensable to China's South China Sea claims.* <https://chinaus-icas.org/research/historical-evidence-is-indispensable-to-chinas-south-china-sea-claims/> (Diakses pada 29 April 2025)

¹⁸ Masters, J. (2024). *Timeline: China's maritime disputes.* Council on Foreign Relations. <https://www.cfr.org/timeline/chinas-maritime-disputes> (Diakses pada 29 April 2025)

konsep hak-hak historis, yang digunakannya untuk membenarkan kedaulatannya atas LTS. Para ahli Tiongkok berpendapat bahwa kehadiran Tiongkok yang sudah berlangsung lama dan bukti-bukti historis mendukung klaimnya. Namun, konsep hak-hak historis dalam hukum internasional secara tradisional terbatas pada wilayah maritim, seperti teluk bersejarah, dan tidak meluas ke wilayah daratan.¹⁹ Mahkamah Internasional (ICJ) telah menolak teori konsolidasi historis sebagai dasar kedaulatan teritorial, dengan menekankan pentingnya kontrol dan persetujuan yang efektif dari negara-negara lain. Selain itu, sembilan garis putus-putus tidak memiliki ketepatan dan kejelasan hukum, sehingga sulit untuk dibenarkan di bawah hukum internasional.²⁰

Pembenaran Tiongkok Atas Klaim Terhadap Laut Tiongkok Selatan

Formalisasi sembilan garis putus-putus dimulai dengan penerbitan sebelas garis putus-putus pada tahun 1948. Seiring berjalannya waktu, garis tersebut tidak hanya mewakili kedaulatan Tiongkok atas pulau-

pulau tersebut, tetapi juga hak-hak bersejarahnya atas penangkapan ikan, navigasi, dan eksploitasi sumber daya di perairan sekitarnya. Deklarasi Laut Teritorial tahun 1958 secara eksplisit memasukkan Kepulauan Spratly, Paracel, Pratas, dan Macclesfield Bank ke dalam wilayah Tiongkok, menetapkan laut teritorial 12 mil laut di sekelilingnya. Selain itu, Undang-Undang tahun 1998 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen menegaskan hak-hak historis Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan, dengan menyatakan bahwa hak-hak ini tetap tidak terpengaruh oleh ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tersebut. Kerangka hukum ini memperkuat pendirian Tiongkok bahwa sembilan garis putus-putus adalah ekspresi yang sah dari kedaulatan dan hak-hak historisnya.²¹

Tiongkok juga telah memberlakukan beberapa undang-undang, termasuk Undang-Undang Perairan Teritorial tahun 1992, yang menegaskan kedaulatan atas pulau-pulau dan perairan di dalam Sembilan Garis Putus-Putus berdasarkan hak-hak historis. Pembentukan yurisdiksi administratif Provinsi Hainan atas LTS pada tahun 1984 semakin memperkuat klaim

¹⁹ Dupuy, F., & Dupuy, P.-M. (2013). A Legal Analysis of China's Historic Rights Claim in the South China Sea. *American Journal of International Law*, 107(1). 141. ISSN 0002-9300. Cambridge University Press (CUP). <https://doi.org/10.5305/amerjintelaw.107.1.0124>

²⁰ Jing, Y., & Li, J. (2019). Who Owns Underwater Cultural Heritage in the South China Sea. *Coastal Management*. 47(1), 107-126, ISSN 0892-0753. Informa UK Limited. <https://doi.org/10.1080/08920753.2019.1540908>

²¹ Gao, Z., & Jia, B. B. (2013). The Nine-Dash Line in the South China Sea: History, Status, and Implications. *American Journal of International Law*. 107(1). 103. Cambridge University Press (CUP). <https://doi.org/10.5305/amerjintelaw.107.1.0098>.

Tiongkok, menciptakan kerangka hukum untuk mengelola pulau-pulau tersebut dan perairan di sekitarnya. Pihak berwenang Tiongkok sering mengutip dokumen, peta, dan catatan sejarah dari berbagai dinasti untuk mendukung klaim mereka, sehingga memperkuat narasi kepemilikan historis.²²

Tiongkok mendasarkan klaimnya di LTS pada penafsiran tertentu atas UNCLOS 1982. Tiongkok berargumen bahwa kepulauan Paracel dan Spratly berstatus sebagai "pulau" penuh menurut Pasal 121 UNCLOS, sehingga berhak memiliki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen.²³ Dengan demikian, aktivitas reklamasi dan konstruksi di gugusan karang seperti Mischief Reef dan Subi Reef dianggap sebagai pelaksanaan kedaulatan dalam ZEE-nya sendiri.²⁴ Tiongkok juga menolak intervensi pihak ketiga dengan mengutip poin ke 6 *Declaration on the Conduct of Parties* (DOC) 2002 yang mengamanatkan

penyelesaian sengketa secara bilateral.²⁵

Sejak tahun 2014, Tiongkok telah melakukan kampanye berskala besar untuk membangun pulau-pulau buatan LTS, terutama berfokus pada terumbu karang dan fitur-fitur yang terendam di Kepulauan Spratly dan Paracel. Upaya ini melibatkan teknik pengerukan dan reklamasi lahan tingkat lanjut, di mana ekskavator kulit kerang besar dan kapal keruk hisap pemotong memompa sedimen dari dasar laut untuk membangun daratan di atas permukaan air yang sebelumnya terendam atau surut. Lokasi-lokasi utama termasuk *Mischief Reef*, *Subi Reef*, dan *Fiery Cross Reef* di Spratly, serta *Woody Island* di Kepulauan Paracel.

Proyek-proyek ini telah mengubah fitur maritim LTS yang dulunya tidak mencolok menjadi pusat militer dan logistik yang dibentengi. Sebagai salah satu contohnya, *Fiery Cross Reef*, yang sebagian besar berada di bawah air sebelum tahun 2014, kini membentang sekitar 2,74 km² dan memiliki landasan pacu sepanjang 3.000 meter,²⁶ hanggar untuk pesawat tempur, dan dermaga air

²² Kipgen, Nehginpao (2020). *The Politics of South China Sea Disputes*. Routledge India. 42. <https://doi.org/10.4324/9781003026334>

²³ Ministry of Foreign Affairs of China. (2016). *China Adheres to the Position of Settling Through Negotiation the Relevant Disputes Between China and the Philippines in the South China Sea*. https://www.mfa.gov.cn/eng/zy/gb/202405/t20240531_11367336.html. (Diakses pada 30 April 2025)

²⁴ Beckman, R. (2013). *The UN Convention on the Law of the Sea and the maritime disputes in the South China Sea*. AJIL. 107(1). 147. <https://doi.org/10.5305/amerjintelaw.107.1.0142>

²⁵ ASEAN. (2002). *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea*, Art. 5(3). <https://arc-agreement.asean.org/file/doc/2015/02/declaration-on-the-conduct-of-parties-in-the-south-china-sea.pdf>

²⁶ Columnist, ET (2023). *Largest Military Buildup In 20 Years, China Goes Unchecked In South China Sea As It Continues Illegal Expansion*. <https://www.eurasiantimes.com/largest-military-buildup-in-20-years-china-goes-unchecked/#:~:text=China%20building%20a%20airstrip%20on,Sandy%20Cay%2C%20and%20Eladad%20Reef.>

dalam yang mampu merapat kapal perang. Demikian pula, Subi Reef, yang terletak hanya 12 mil laut dari Pulau Thitu yang diklaim Filipina, telah diperluas untuk mencakup kubah radar, tempat perlindungan rudal, landasan pacu untuk jet tempur Tiongkok yang disertai rudal kendali jelajah anti-kapal dan rudal permukaan-ke-udara jarak jauh, dan barak personel.²⁷

Tindakan tegas Tiongkok di LTS, seperti pembangunan pulau berskala besar ini telah menciptakan defisit legitimasi yang signifikan, yang memicu ketidakpercayaan dan skeptisisme regional terhadap niat Tiongkok. Langkah-langkah ini, yang didorong oleh nasionalisme maritim, dipandang merusak tatanan maritim berbasis aturan di bawah UNCLOS, dan mengintensifkan persaingan strategis, terutama dengan AS.

Untuk mengatasi defisit ini dan membangun tatanan maritim yang sah, ada tiga langkah kunci yang penting: beradaptasi dengan dinamika kekuatan yang berkembang melalui konsensus regional dan bukan melewati tindakan unilateral, memperkuat institusi untuk menengahi tantangan keamanan maritim seperti sengketa sumber daya dan degradasi lingkungan, dan mengkonsolidasikan norma pencegahan

konflik melalui mekanisme seperti sistem notifikasi darurat, perjanjian berbagi data, dan dialog multilateral.²⁸ Dengan berfokus pada bidang-bidang ini, Tiongkok dan aktor regional lainnya dapat bekerja menuju tatanan maritim yang lebih stabil dan sah di LTS, menyeimbangkan kepentingan nasional dengan tanggung jawab kolektif.

Urgensi Tiongkok Melakukan Pembangunan Pulau Buatan

Urgensi Tiongkok dalam membangun pulau-pulau buatan di Laut Tiongkok Selatan didorong oleh interaksi yang kompleks antara faktor-faktor strategis, ekonomi, dan geopolitik. Wilayah ini tidak hanya kaya akan sumber daya alam, seperti cadangan minyak dan gas, tetapi juga berfungsi sebagai jalur maritim yang vital bagi perdagangan global, dengan sebagian besar lalu lintas pelayaran dunia yang melewati perairannya. Dengan membangun pulau-pulau ini, Tiongkok berusaha untuk menegaskan klaim teritorialnya dan membangun kehadiran yang dominan di wilayah yang diperebutkan oleh beberapa negara tetangga, termasuk Vietnam, Filipina, dan Malaysia. Ekspansi ini mencerminkan ambisi Tiongkok yang lebih luas untuk membentuk kembali tatanan regional yang

²⁷ Seymour, C. M. (2023). Navigating The South China Sea: Analyzing the Current Dispute Over Sovereignty, Maritime Zones, and Maritime Rights. *South Carolina Journal of International Law and Business*. scholarcommons.sc.edu.<https://scholarcommons.sc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1268&context=scjilb>

²⁸ Morton, K. (2016). China's ambition in the South China Sea: is a legitimate maritime order possible?. *International Affairs*. 936-938. academic.oup.com.
<https://doi.org/10.1111/1468-2346.12658>

menguntungkan.

Pulau-pulau buatan ini telah dimiliterisasi dengan cepat, menampilkan infrastruktur canggih, instalasi militer, dan persenjataan. Transformasi ini memungkinkan Tiongkok untuk meningkatkan kemampuan militernya dan memproyeksikan kekuatannya di seluruh kawasan Indo-Pasifik. Urgensi perkembangan ini semakin digarisbawahi oleh meningkatnya keterlibatan Amerika Serikat dan sekutunya, yang telah melakukan operasi kebebasan navigasi untuk menantang klaim Tiongkok. Dengan memperkuat kehadirannya di Laut Tiongkok Selatan, Tiongkok bertujuan untuk menghalangi campur tangan pihak luar dan mengamankan kepentingan nasionalnya, dengan demikian menciptakan status quo baru yang mendukung tujuan strategisnya.

Implikasi dari kegiatan pembangunan pulau oleh Tiongkok melampaui dinamika regional, mereka menimbulkan tantangan yang signifikan terhadap hubungan internasional dan stabilitas global. Ketika ketegangan meningkat, potensi konflik meningkat, menarik negara-negara besar dan memperumit upaya diplomatik. Warisan sejarah dan sentimen nasionalisme yang melingkupi sengketa teritorial semakin memperburuk situasi, sehingga penyelesaiannya semakin sulit. Tindakan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan merupakan simbol dari perjuangan mereka yang lebih luas untuk mendapatkan pengaruh lebih

besar di Asia, di mana negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Australia, dan Jepang sedang mendefinisikan kembali lanskap geopolitik di wilayah Laut Tiongkok Selatan.

Strategi Militer dan Kontrol Maritim

Pembangunan pulau buatan yang dilakukan oleh Tiongkok dengan cepat di LTS merupakan strategi militer yang disengaja dengan implikasi keamanan regional yang besar. Urgensi di balik dimensi militer ini menunjukkan perhitungan strategis yang cermat yang bertujuan untuk mengubah keseimbangan kekuatan regional secara mendasar.

Pulau-pulau buatan Tiongkok berfungsi sebagai jaringan yang terkoordinasi daripada pos-pos yang terisolasi, menciptakan apa yang oleh analis militer disebut sebagai “sistem pertahanan maritim terpadu” di seluruh LTS.²⁹ Pulau-pulau ini memiliki cakupan radar yang tumpang tindih, landasan pacu militer, dan platform senjata yang secara kolektif memperluas kemampuan Tiongkok untuk memantau dan berpotensi

²⁹U.S. Department of Defense. (2023). *Military and security developments involving the People's Republic of China 2023*. Annual Report to Congress. <https://media.defense.gov/2023/Oct/19/2003323409/-1/-1/1/2023-MILITARY-AND-SECURITY-DEVELOPMENTS-INVOLVING-THE-PEOPLES-REPUBLIC-OF-CHINA.PDF> (Diakses pada 21 April 2025).

mengendalikan lalu lintas maritim dan udara di seluruh bentangan perairan yang disengketakan. Jadwal pembangunan yang cepat menunjukkan pengakuan yang mendesak bahwa membangun jaringan ini akan memberikan keuntungan strategis yang menentukan sebelum tindakan penanggulangan potensial dapat diimplementasikan.

Infrastruktur militer yang dikerahkan ke pulau-pulau ini meliputi tiga landasan udara kelas militer sepanjang 3.000 meter yang mampu mendukung jet tempur, pesawat pengebom, dan pesawat angkut militer. Sistem radar canggih dengan jangkauan pengawasan sekitar 300+ km. Hanggar pesawat yang diperkuat yang dirancang untuk melindungi pesawat militer dari serangan, disertai instalasi rudal anti-kapal dan anti-pesawat, dan instalasi angkatan laut yang dapat mengakomodasi kapal patroli laut.³⁰

Pulau-pulau buatan Tiongkok membentuk tulang punggung fisik dari apa yang diidentifikasi oleh para ahli strategi militer sebagai strategi “Penolakan Akses/Area” (A2/AD). Pendekatan ini bertujuan untuk mencegah musuh potensial - terutama Amerika Serikat dan

sekutunya - agar tidak beroperasi secara bebas di rantai pulau pertama dan kedua di Pasifik Barat.³¹ Urgensi dalam membangun kapabilitas ini mencerminkan penilaian Tiongkok bahwa penundaan implementasi akan memungkinkan Amerika Serikat untuk semakin memperkuat kemitraan militernya di wilayah tersebut. Waktu yang strategis bertepatan dengan kebijakan “*Pivot to Asia*” yang diumumkan oleh Amerika Serikat, yang mengisyaratkan peningkatan perhatian militer Amerika Serikat terhadap kawasan ini. Pembangunan yang dipercepat oleh Tiongkok merupakan langkah balasan untuk membangun kemampuan A2/AD sebelum reorientasi strategis Amerika ini dapat sepenuhnya terwujud.³²

Urgensi untuk membangun posisi maju berasal dari doktrin militer “pertahanan aktif” Tiongkok, yang menekankan pada pengambilan inisiatif dalam potensi konflik dengan memperluas perimeter pertahanan di luar batas-batas teritorial tradisional. Pulau-

³⁰ Asia Maritime Transparency Initiative. (2022). *Island tracker: China*. Center for Strategic and International Studies. <https://amti.csis.org/island-tracker/china/> (Diakses pada 21 April 2025).

³¹ Erickson, A. S., & Wuthnow, J. (2016). Barriers, springboards and benchmarks: China conceptualizes the Pacific "Island Chains". *The China Quarterly*, 225, 13-15. doi:10.1017/S0305741016000011

³² Clinton, H. (2011). *America's Pacific century*. Foreign Policy. <https://foreignpolicy.com/2011/10/11/america-pacific-century/> (Diakses pada 21 April 2025).

pulau ini menciptakan apa yang disebut oleh para ahli strategi militer sebagai “posisi pertahanan ke depan” yang memperluas perbatasan maritim Tiongkok yang efektif hingga ratusan kilometer di luar garis pantainya. Kedalaman strategis ini memberikan kemampuan peringatan dini yang penting dan menempatkan aset militer lebih dekat ke titik nyala regional yang potensial, termasuk Taiwan.³³ pulau-pulau buatan itu secara dramatis meningkatkan kemampuan Tiongkok untuk memantau kegiatan militer dan komersial di seluruh LTS. Urgensi untuk membangun kemampuan pengamatan ini mencerminkan penilaian Tiongkok bahwa kesadaran domain maritim yang komprehensif merupakan keunggulan strategis yang menentukan.³⁴

Sumber Daya dan Kepentingan Ekonomi

Urgensi untuk membangun posisi maju berasal dari doktrin militer “pertahanan aktif” Tiongkok, yang menekankan pada

pengambilan inisiatif dalam potensi konflik dengan memperluas perimeter pertahanan di luar batas-batas teritorial tradisional. Pulau-pulau ini menciptakan apa yang disebut oleh para ahli strategi militer sebagai “posisi pertahanan ke depan” yang memperluas perbatasan maritim Tiongkok yang efektif hingga ratusan kilometer di luar garis pantainya. Kedalaman strategis ini memberikan kemampuan peringatan dini yang penting dan menempatkan aset militer lebih dekat ke titik nyala regional yang potensial, termasuk Taiwan.³⁵ pulau-pulau buatan itu secara dramatis meningkatkan kemampuan Tiongkok untuk memantau kegiatan militer dan komersial di seluruh LTS. Urgensi untuk membangun kemampuan pengamatan ini mencerminkan penilaian Tiongkok bahwa kesadaran domain maritim yang komprehensif merupakan keunggulan strategis yang menentukan.³⁶

LTS merupakan salah satu wilayah perairan paling strategis

³³ O'Rourke, R. (2024). *China naval modernization: Implications for U.S. Navy capabilities—Background and issues for Congress*. Congressional Research Service.
https://www.congress.gov/crs_external_products/RL/PDF/RL33153/RL33153.285.pdf (Diakses pada 21 April 2025).

³⁴ Ernst, M. (2021). Costs of Coercion: Predicaments of Chinese Statecraft in the Asia-Pacific. *Global Politics Review*. 7(1-2). 10.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.4540509>

³⁵ O'Rourke, R. (2024). *China naval modernization: Implications for U.S. Navy capabilities—Background and issues for Congress*. Congressional Research Service.
https://www.congress.gov/crs_external_products/RL/PDF/RL33153/RL33153.285.pdf (Diakses pada 21 April 2025).

³⁶ Ernst, M. (2021). Costs of Coercion: Predicaments of Chinese Statecraft in the Asia-Pacific. *Global Politics Review*. 7(1-2). 10.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.4540509>

secara ekonomi di dunia, yang menurut estimasi terbaru mengandung cadangan hidrokarbon signifikan sekitar 11 miliar barel minyak dan 190 triliun kaki kubik gas alam, meskipun angka sebenarnya dapat bervariasi karena keterbatasan eksplorasi akibat sengketa teritorial yang berkelanjutan.³⁷ Kepentingan ekonomi Filipina di wilayah tersebut terutama berpusat pada potensi cadangan energi di Cekungan *Reed Bank* yang diperkirakan mengandung 5,4 miliar barel setara minyak (boe), yang dapat secara signifikan mengurangi ketergantungan energi Filipina.³⁸ Selain hidrokarbon, LTS juga mewakili salah satu perikanan paling produktif di dunia, dengan nilai tahunan sekitar \$21-24 miliar dan menyediakan mata pencaharian bagi lebih dari 3,7 juta nelayan Filipina.³⁹

³⁷ U.S. Energy Information Administration. (2022). *South China Sea regional analysis brief*. https://www.eia.gov/international/analysis/regions-of-interest/South_China_Sea (Diakses pada 28 April 2025).

³⁸ Chen, M.. (2025). *Why Reed Bank could be the next flashpoint for South China Sea tensions*. South China Morning Post. <https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3307827/why-reed-bank-could-be-next-flashpoint-south-china-sea-tensions> (diakses pada 30 April 2025).

³⁹ Asia Maritime Transparency Initiative. (2017). *A Blueprint for Fisheries Management and Environmental Cooperation in the South China Sea*. Center for Strategic and International Studies. <https://amti.csis.org/coc-blueprint-fisheries-environment/> (Diakses pada 30

Signifikansi ekonomi LTS juga terkait dengan perannya sebagai jalur perdagangan vital, dengan sekitar sepertiga perdagangan maritim global senilai lebih dari \$5,3 triliun melintasi perairannya setiap tahun, dimana sekitar \$1,2 triliun di antaranya merupakan perdagangan terkait Amerika Serikat.⁴⁰ Bagi Filipina, yang secara geografis diapit oleh LTS di barat dan Samudra Pasifik di timur, keamanan jalur pelayaran ini sangat penting mengingat lebih dari 60% perdagangan eksternalnya bergantung pada rute maritim yang melintasi perairan yang disengketakan.⁴¹

Tantangan terhadap kebebasan navigasi komersial berpotensi mengancam ketahanan ekonomi nasional dan ambisi Manila untuk menjadi pusat logistik regional sebagaimana digariskan dalam Philippine Development Plan 2023-2028.⁴² Studi dari *Asian*

April 2025).

⁴⁰ ChinaPower. *How Much Trade Transits the South China Sea?*. <https://chinapower.csis.org/much-trade-transits-south-china-sea/>. (Diakses pada 30 April 2025)

⁴¹ Philippine Statistics Authority. (2021). *Foreign trade statistics of the Philippines: 2020*. https://psa.gov.ph/system/files/main-publication/2020%2520FTS%2520Publication_signed-compressed.pdf. (Diakses pada 30 April 2025)

⁴² National Economic and Development Authority. (2023). *Philippine Development Plan 2023-2028*. Republic of the Philippines. <https://pdp.neda.gov.ph/wp-content/uploads/2023/01/PDP-2023-2028.pdf>. (Diakses pada 30 April 2025)

Development Bank menunjukkan bahwa gangguan pada jalur pelayaran utama di LTS dapat meningkatkan biaya logistik Filipina hingga 25% dan mengurangi pertumbuhan PDB tahunan sebesar 2-3%, yang menggarisbawahi kerentanan struktural ekonomi Filipina terhadap stabilitas maritim regional.⁴³

Upaya Filipina untuk mengamankan kepentingan ekonominya di LTS juga diwujudkan melalui pendekatan "*blue economy*" yang holistik, yang berupaya menyeimbangkan pemanfaatan sumber daya dengan konservasi lingkungan laut untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Strategi Filipina untuk Ekonomi Biru, yang diluncurkan pada tahun 2022, memproyeksikan potensi kontribusi ekonomi dari ekosistem terumbu karang yang sehat dan industri pariwisata bahari yang berkembang di wilayah yang sekarang disengketakan.⁴⁴

Beberapa inisiatif ekonomi inovatif telah diusulkan, termasuk pengembangan taman laut lintas

batas dan skema pengelolaan perikanan bersama yang dapat meningkatkan kerja sama regional sambil memitigasi risiko konfrontasi militer.⁴⁵ Namun, implementasi visi *blue economy* ini tetap sulit dilakukan dalam konteks persaingan geopolitik yang intensif dan militerisasi yang berkelanjutan di wilayah tersebut, yang mencerminkan tantangan jangka panjang dalam menyeimbangkan kepentingan ekonomi, kedaulatan nasional, dan stabilitas regional dalam kebijakan maritim Filipina.⁴⁶

Kepentingan Geopolitik

Pembangunan pulau buatan Tiongkok di LTS memiliki dimensi kepentingan geopolitik yang kompleks dan strategis. Kepentingan geopolitik ini merupakan manifestasi dari upaya Tiongkok untuk memproyeksikan kekuatannya di kawasan, mengamankan jalur perdagangan maritim, serta menegaskan klaimnya atas wilayah yang dipersengketakan. Tiongkok telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kedudukan mereka dalam permainan geopolitik dunia yang selalu berubah.

⁴³ Chia, S. & Plummer, M. G. (2015). *ASEAN Economic Cooperation and Integration: Progress, Challenges and Future Directions*. 178-192. Asian Development Bank & Cambridge University Press. <http://dx.doi.org/10.1017/CBO9781316218587>.

⁴⁴ National Economic and Development Authority. (2023). *Op.Cit.* 18.

⁴⁵ James Borton (2015). *Marine Peace Park Plan Offers Promise For South China Sea – Analysis*. Eurasiareview <https://www.eurasiareview.com/30102015-marine-peace-park-plan-offers-promise-for-south-china-sea-analysis/> (Diakses pada 30 April 2025)

⁴⁶ National Economic and Development Authority. *Loc.Cit.* 360.

Tiongkok memanfaatkan reklamasi dan pembangunan pulau buatan di LTS sebagai bagian dari strategi proyeksi kekuatan yang lebih luas. Aktivitas pembangunan pulau buatan ini merupakan bentuk dari apa yang disebut sebagai "strategi *anti-access/area denial*" (A2/AD) yang bertujuan untuk membatasi kemampuan negara lain, terutama Amerika Serikat, untuk beroperasi secara militer di kawasan tersebut.⁴⁷ Pulau-pulau buatan yang dilengkapi dengan infrastruktur militer memungkinkan Tiongkok untuk memperluas jangkauan proyeksi kekuatannya jauh melampaui wilayah kontinentalnya.⁴⁸

Pembangunan infrastuktur pulau buatan tersebut dapat menampung peralatan perang seperti rudal anti kapal dan rudal anti udara yang dapat meningkatkan kapabilitas Tiongkok secara signifikan, dengan terjadinya pembangunan pulau buatan tersebut, kapabilitas A2/AD Tiongkok bahkan telah mencapai

Guam, yang merupakan salah satu wilayah teritorial AS di Guam dengan jarak kurang lebih 4.000 km dari Beijing, Tiongkok.

Tiongkok berupaya memperkuat klaimnya atas hampir seluruh wilayah LTS yang didasarkan pada konsep garis sembilan putus-putus. Strategi ini dikenal sebagai pendekatan "mengubah fakta di lapangan" atau "*fait accompli*" untuk memperkuat posisi Tiongkok dalam sengketa teritorial yang berlangsung.⁴⁹ Pulau-pulau buatan ini menjadi instrumen untuk memformalkan klaim Tiongkok yang sebelumnya bersifat abstrak menjadi bentuk kontrol fisik yang lebih konkret.⁵⁰ Meskipun Mahkamah Arbitrase Internasional pada tahun 2016 telah menolak klaim historis Tiongkok atas wilayah LTS, Tiongkok terus mempertahankan posisinya dan memperkuat kehadirannya melalui pembangunan pulau buatan tersebut.

Persaingan strategis antara Tiongkok dan Amerika Serikat

⁴⁷ Kaplan, R. D. & Myers J. J. (2014). *Asia's cauldron: The South China Sea and the end of a stable Pacific*. Carnegie Council for Ethics in International Affairs. 6-7. https://media-1.carnegiecouncil.org/import/studio/Asia%27s_Cauldron.pdf (Diakses pada 30 April 2025)

⁴⁸ Grossman, D. (2024). *How to Respond to China's Tactics in the South China Sea*. Rand. <https://www.rand.org/pubs/commentary/2024/06/how-to-respond-to-chinas-tactics-in-the-south-china.html>. (Diakses pada 30 April 2025)

⁴⁹ Erickson, A. S., & Strange, A. M. (2014). Pandora's sandbox: China's island-building strategy in the South China Sea. *Foreign Affairs*. <https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2014-07-13/pandoras-sandbox>. (Diakses pada 30 April 2025)

⁵⁰ Fravel, M. T. (2012). *Chapter II: Maritime security in the South China Sea and the competition over maritime rights*. Dalam P. Cronin, (Eds.). *Cooperation from strength: The United States, China and the South China Sea*. 33-50. Center for a New American Security.

menjadi faktor signifikan dalam keputusan Tiongkok untuk membangun pulau buatan di LTS. Kebijakan "*pivot to Asia*" atau "*rebalancing to Asia*" yang dicanangkan Amerika Serikat pada masa pemerintahan Obama dilihat oleh Beijing sebagai upaya pengepungan dan pembendungan pengaruh Tiongkok di kawasan.⁵¹

Pembangunan pulau buatan merupakan respons strategis Tiongkok terhadap kehadiran militer Amerika Serikat yang dominan di kawasan Indo-Pasifik.⁵² Dengan membangun pulau buatan yang dilengkapi fasilitas militer, Tiongkok berusaha mengimbangi dominasi Amerika Serikat dan membatasi keleluasaan operasi Angkatan Laut Amerika Serikat di LTS. Pembangunan pulau buatan Tiongkok di LTS memiliki implikasi geopolitik yang signifikan bagi Filipina dan negara-negara ASEAN lainnya. Aktivitas Tiongkok ini telah menciptakan dilema bagi Filipina di masa pemerintahan Duterte, yang harus menyeimbangkan hubungan ekonominya yang semakin dekat dengan Tiongkok dan kebutuhan untuk mempertahankan kedaulatan

⁵¹ Zhao, S. (2014). *A new model of big power relations? China-US strategic rivalry and balance of power in the Asia-Pacific*. *Journal of Contemporary China*. 24(93), 377-397.

⁵² Medcalf, R. (2020). *Indo-Pacific Empire: China, America and the Contest for the World's Pivotal Region*. Manchester University Press.

teritorialnya.⁵³

Pendekatan Duterte yang lebih akomodatif terhadap Tiongkok mencerminkan pengakuan atas realitas pergeseran kekuatan regional dan keterbatasan Filipina untuk menantang Tiongkok secara langsung.⁵⁴ Situasi ini menggambarkan dinamika kompleks dari geopolitik kontemporer di Asia Tenggara, di mana negara-negara lebih kecil harus bermanuver di antara kepentingan kekuatan besar.

Tanggapan Filipina Terhadap Tindakan Tiongkok

Pembangunan pulau buatan merupakan respons strategis Tiongkok terhadap kehadiran militer Amerika Serikat yang dominan di kawasan Indo-Pasifik.⁵⁵ Dengan membangun pulau buatan yang dilengkapi fasilitas militer, Tiongkok berusaha mengimbangi dominasi Amerika Serikat dan membatasi keleluasaan operasi Angkatan Laut Amerika Serikat di LTS. Pembangunan pulau buatan

⁵³ De Castro, R. C. (2017). *The Duterte administration's foreign policy: Unraveling the Aquino administration's balancing agenda on an emergent China*. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*. 36(3). 139-159.

⁵⁴ Heydarian, R. J. (2017). *The rise of Duterte: A populist revolt against elite democracy*. <http://dx.doi.org/10.1007/978-981-10-5918-6>

⁵⁵ Medcalf, R. (2020). *Indo-Pacific Empire: China, America and the Contest for the World's Pivotal Region*. Manchester University Press.

Tiongkok di LTS memiliki implikasi geopolitik yang signifikan bagi Filipina dan negara-negara ASEAN lainnya. Aktivitas Tiongkok ini telah menciptakan dilema bagi Filipina di masa pemerintahan Duterte, yang harus menyeimbangkan hubungan ekonominya yang semakin dekat dengan Tiongkok dan kebutuhan untuk mempertahankan kedaulatan teritorialnya.⁵⁶

Masa kepemimpinan Ferdinand Marcos Jr. yang dimulai pada Juni 2022 menandai perubahan paradigma fundamental dalam diplomasi Filipina terhadap Tiongkok, mengakhiri era akomodatif Duterte dan mengadopsi pendekatan konfrontatif yang lebih tegas dalam merespons pembangunan pulau buatan dan ekspansionisme maritim Tiongkok di LTS. Administrasi Marcos Jr. menerapkan *transparency initiative* yang mengontraskan secara tajam dengan diplomasi diam-diam era sebelumnya, dengan secara konsisten mempublikasikan insiden-insiden maritim dan konfrontasi dengan kekuatan Tiongkok untuk membangun dukungan internasional.⁵⁷

⁵⁶ De Castro, R. C. (2017). *The Duterte administration's foreign policy: Unraveling the Aquino administration's balancing agenda on an emergent China*. Journal of Current Southeast Asian Affairs. 36(3). 139-159.

⁵⁷ [Misalucha-Willoughby](#) C. (2024). *Navigating turbulence at Second Thomas Shoal*. Carnegie Endowment for

Transformasi strategis ini tercermin dalam intensifikasi konflik di Second Thomas Shoal, yang menjadi epicentrum ketegangan bilateral, dimana sengketa paling kontroversial Filipina dengan Tiongkok berpusat pada kawasan ini di Kepulauan Spratly. Pergeseran diplomatik ini juga disertai dengan penguatan aliansi dengan Amerika Serikat melalui perluasan EDCA dan aktivisasi diplomasi multilateral untuk mengimbangi pengaruh Tiongkok.

Setelah terpilih pada Juni 2022, Presiden Ferdinand Marcos Jr. menggeser kebijakan luar negeri Filipina yang sebelumnya lebih kooperatif dengan Tiongkok di bawah Rodrigo Duterte. Marcos Jr. menegaskan komitmen Filipina untuk mempertahankan kedaulatan di LTS dengan mengacu pada *Arbitral Ruling* atau arbitrase 2016 yang mengabaikan klaim historis Tiongkok. Langkah ini ditandai dengan peningkatan kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat, termasuk perluasan akses militer Amerika Serikat ke pangkalan Filipina melalui EDCA.⁵⁸ Pergeseran ini

International Peace. <https://carnegieendowment.org/posts/2024/08/navigating-turbulence-at-second-thomas-shoal?lang=en>

⁵⁸ Caballero-Anthony, M. (2022). The ASEAN way and the changing security environment: navigating challenges to informality and centrality. International Politics. <https://doi.org/10.1057/s41311-022-00400-0>

mencerminkan upaya Marcos Jr. untuk menyeimbangkan hubungan dengan Tiongkok sambil menguatkan aliansi tradisional dengan AS.

Meskipun demikian, Marcos Jr. tetap menjaga dialog ekonomi dengan Tiongkok, mengakui perannya sebagai mitra perdagangan terbesar Filipina. Pada 2024, Tiongkok menyumbang 25,7% dari total impor Filipina dan menjadi tujuan ekspor utama produk pertanian.⁵⁹ Faktor domestik juga memengaruhi kebijakan Marcos Jr., terutama tekanan dari militer, tekanan ini diperkuat oleh insiden seperti penggunaan *water cannon* oleh kapal Tiongkok terhadap kapal Filipina di *Second Thomas Shoal* pada 2023.⁶⁰ Marcos Jr. merespons dengan memperkuat modernisasi militer melalui pembelian sistem radar dan kapal patroli dari Jepang dan AS, sekaligus meningkatkan anggaran pertahanan pada 2024.⁶¹ Langkah ini mencerminkan prioritas keamanan maritim yang lebih tinggi dibanding era Duterte.

⁵⁹ Philippine Statistics Authority. (2025). *International Merchandise Trade Statistics of the Philippines 2024*. <https://psa.gov.ph/statistics/export-import/annual>. (Diakses pada 3 Mei 2025)

⁶⁰ Asia Maritime Transparency Initiative. (2024). *Shifting Tactics at Second Thomas Shoal*. <https://amti.csis.org/shifting-tactics-at-second-thomas-shoal/>. (Diakses pada 3 Mei 2025)

⁶¹ International Institute for Strategic Studies. (2024). *The military balance 2024*. Routledge. 8.

Prospek hubungan Filipina-Tiongkok di bawah Marcos Jr. tetap dipenuhi ketidakpastian. Di satu sisi, kedua negara berupaya menghindari eskalasi konflik terbuka melalui mekanisme *bilateral consultation*.⁶² Di sisi lain, ketegangan terus meningkat seiring pembangunan pulau buatan Tiongkok yang dipersenjatai. Marcos Jr. menyerukan pendekatan multilateral melalui ASEAN dan PBB, tetapi efektivitasnya terhambat oleh perpecahan di tubuh ASEAN.⁶³

Transformasi hubungan bilateral ini telah mendorong Filipina untuk melakukan diversifikasi strategis dalam kemitraan internasionalnya, yang ditandai dengan penguatan hubungan ekonomi dengan Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang sambil tetap menjaga jarak dari Tiongkok dalam isu LTS.⁶⁴

⁶² Ministry of Foreign Affairs of China (2025). *China and the Philippines Hold the Tenth Meeting of the Bilateral Consultation Mechanism on the South China Sea*. https://www.mfa.gov.cn/eng/xw/wjbxw/202501/t20250117_11537079.html. (Diakses pada 3 Mei 2025)

⁶³ De Castro, R. C. (2024). *Exploring the Philippines' evolving grand strategy in the face of China's maritime expansion: From the Aquino administration to the Marcos administration*. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*. 43(1). 94-119. <https://doi.org/10.1177/18681034241234670>

⁶⁴ Reinsch, W. A. & Samuel R. (2025). *Rocking the boat: The Philippines trade strategy amid rising geoeconomic tensions*. Center for Strategic and International Studies. <https://www.csis.org/analysis/rocking-boat->

Pertemuan Presiden Marcos Jr. dengan Presiden Xi Jinping tidak mencapai hasil yang diinginkan, dimana Beijing tidak setuju untuk membuat investasi baru yang besar atau membatasi taktik *grey zone* nya di LTS.⁶⁵

Dampak pembangunan pulau buatan juga memaksa Filipina untuk memperkuat kemitraan dengan negara-negara tetangga Indo-Pasifik lainnya, dengan Marcos Jr. menandatangani kesepakatan untuk meningkatkan akses pangkalan, pelatihan latihan bersama, dan transfer senjata dengan Amerika Serikat.⁶⁶ Strategi kebijakan luar negeri Presiden Marcos ini mencerminkan upaya menyeimbangkan kedaulatan, aliansi AS, dan hubungan ekonomi dengan Tiongkok dalam menghadapi realitas geopolitik yang berubah akibat ekspansionisme maritim Tiongkok.

Simpulan

[philippines-trade-strategy-amid-rising-geo-economic-tensions](#). (Diakses pada 3 Mei 2025)

⁶⁵ International Crisis Group. (2024). *Philippines: Calming tensions in the South China Sea*. <https://www.crisisgroup.org/asia/south-east-asia/philippines-south-china-sea/philippines-calming-tensions-south-china-sea>. (Diakses pada 3 Mei 2025)

⁶⁶ Center for Preventive Action (2024). *Territorial Disputes in the South China Sea*. Council on Foreign Relations. <https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/territorial-disputes-south-china-sea>. (Diakses pada 3 Mei 2025)

Pembangunan pulau buatan oleh Republik Rakyat Tiongkok di wilayah Laut Tiongkok Selatan telah membawa dampak yang luas dan mendalam terhadap dinamika hubungan diplomasi antara Tiongkok dan Filipina. Tindakan ini tidak hanya merepresentasikan ekspansi fisik atas wilayah yang disengketakan, tetapi juga menunjukkan strategi kekuatan maritim Tiongkok dalam meningkatkan kontrol atas kawasan yang secara geopolitik sangat strategis. Keberadaan fasilitas militer dan pelabuhan udara di atas pulau-pulau reklamasi mengindikasikan adanya niat jangka panjang Tiongkok untuk menjadikan kawasan tersebut sebagai bagian dari zona pengaruh langsungnya.

Filipina, sebagai salah satu pihak yang terkena dampak langsung dari aktivitas tersebut, menghadapi dilema dalam menentukan arah kebijakan luar negerinya. Di bawah pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte, Filipina mengambil pendekatan yang lebih lunak dan akomodatif terhadap Tiongkok, dengan harapan dapat memperoleh manfaat ekonomi, seperti investasi dan bantuan infrastruktur. Namun, pendekatan ini tidak sepenuhnya berhasil meredam agresivitas Tiongkok di wilayah sengketa, sehingga Filipina tetap mengalami tekanan geopolitik dan kerugian strategis di wilayah ZEE-nya.

Seiring dengan transisi kekuasaan ke Presiden Ferdinand Marcos Jr., kebijakan luar negeri Filipina menunjukkan perubahan yang cukup signifikan. Pemerintahan baru mengambil sikap yang lebih vokal dan terbuka dalam menanggapi pelanggaran kedaulatan oleh Tiongkok. Langkah-langkah seperti memperkuat aliansi militer dengan Amerika Serikat, meningkatkan latihan gabungan, serta mendorong pengawasan maritim bersama menjadi bentuk reorientasi kebijakan luar negeri yang menekankan pada penguatan pertahanan dan perimbangan kekuatan di kawasan.

Secara regional, tindakan Tiongkok juga memperumit upaya ASEAN dalam menjaga stabilitas kawasan. Ketidakjelasan sikap Tiongkok dalam menyelesaikan sengketa secara multilateral telah menurunkan tingkat kepercayaan di antara negara-negara anggota ASEAN. Proses perundingan COC yang telah berlangsung selama lebih dari satu dekade belum menunjukkan hasil yang konkret, karena Tiongkok cenderung mengedepankan pendekatan bilateral yang lebih menguntungkan posisinya. Dalam konteks ini, Filipina berupaya mendorong pendekatan multilateral sebagai upaya untuk menekan Tiongkok secara kolektif melalui norma dan aturan internasional.

Dari sudut pandang teoretis, pendekatan realisme ofensif sangat relevan untuk menjelaskan perilaku Tiongkok. Negara tersebut menggunakan kekuatan militer dan ekonomi untuk memaksimalkan pengaruhnya secara regional, sesuai dengan prinsip dasar dalam realisme ofensif yang menekankan pentingnya akumulasi kekuatan untuk menjamin keamanan. Transformasi pulau-pulau karang menjadi pangkalan militer oleh Tiongkok telah menciptakan persepsi ancaman serius di kalangan negara-negara tetangga. Persepsi ini mendorong negara-negara seperti Filipina untuk melakukan berbagai langkah pertahanan yang lebih asertif guna menjamin eksistensi dan integritas wilayahnya, dan sebagai bentuk respon atas ekspansi kekuatan oleh Tiongkok di wilayah LTS.

Hubungan bilateral antara Filipina dan Tiongkok pada akhirnya menjadi sangat kompleks dan tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu dimensi kerja sama atau konflik. Meski kerja sama ekonomi tetap berlangsung, terutama di sektor perdagangan dan investasi, namun ketegangan politik dan militer terus meningkat akibat aktivitas Tiongkok yang dinilai melanggar hukum internasional. Ketidakseimbangan ini menunjukkan bahwa hubungan internasional pada dasarnya bersifat dinamis dan dapat mengalami

pergeseran mendalam ketika kepentingan kedaulatan dan keamanan negara mulai terancam secara langsung.

Dengan demikian, pembangunan pulau buatan oleh Tiongkok merupakan bentuk tantangan nyata terhadap tatanan maritim internasional yang diatur oleh UNCLOS. Filipina, sebagai negara yang terdampak, harus mampu menyeimbangkan pendekatan ekonomi dan keamanan dalam menjalin hubungan diplomasi dengan Tiongkok. Dalam jangka panjang, keberhasilan Filipina dalam merespons isu ini secara strategis tidak hanya akan menentukan stabilitas nasional, tetapi juga posisi tawarnya di tengah rivalitas kekuatan besar yang tengah berlangsung di kawasan Asia-Pasifik.

DAFTAR PUSTAKA

- ASEAN (2022). *ASEAN, China announce ACFTA upgrade*. <https://asean.org/asean-china-announce-acfta-upgrade/>. (Diakses pada 6 Mei 2024).
- ASEAN. (2002). *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea*, Art. 5(3). <https://arc-agreement.asean.org/file/doc/2015/02/declaration-on-the-conduct-of-parties-in-the-south-china-sea.pdf>
- Asia Maritime Transparency Initiative. (2017). *A Blueprint for Fisheries Management and*

Environmental Cooperation in the South China Sea. Center for Strategic and International Studies.

<https://amti.csis.org/coc-blueprint-fisheries-environment/> (Diakses pada 30 April 2025).

Asia Maritime Transparency Initiative. (2022). *Island tracker: China*. Center for Strategic and International Studies.

<https://amti.csis.org/island-tracker/china/> (Diakses pada 21 April 2025).

Asia Maritime Transparency Initiative. (2024). *Shifting Tactics at Second Thomas Shoal*.

<https://amti.csis.org/shifting-tactics-at-second-thomas-shoal/>. (Diakses pada 3 Mei 2025)

Beckman, R. (2013). *The UN Convention on the Law of the Sea and the maritime disputes in the South China Sea*. *AJIL*. 107(1). 147. <https://doi.org/10.5305/amerjin.telow.107.1.0142>

Beckman, R. (2017). *China's 'Island-Building' in the South China Sea: Implications for Regional Security*. *Council for Security Cooperation in the Asia Pacific*. 40-41.

Caballero-Anthony, M. (2022). *The ASEAN way and the changing security environment: navigating challenges to*

- informality and centrality. *International Politics*.
<https://doi.org/10.1057/s41311-022-00400-0>
- Center for Preventive Action (2024). *Territorial Disputes in the South China Sea*. Council on Foreign Relations.
<https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/territorial-disputes-south-china-sea>.
 (Diakses pada 3 Mei 2025)
- Channel News Asia. *ASEAN, China Agree on guidelines to accelerate South China Sea code of conduct negotiations*.
<https://www.channelnewsasia.com/asia/asean-china-south-china-sea-code-conduct-wang-yi-3626306> (Diakses pada 21 Mei 2024)
- Chen, M.. (2025). *Why Reed Bank could be the next flashpoint for South China Sea tensions*. South China Morning Post.
<https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3307827/why-reed-bank-could-be-next-flashpoint-south-china-sea-tensions> (diakses pada 30 April 2025).
- Chia, S. & Plummer, M. G. (2015). *ASEAN Economic Cooperation and Integration: Progress, Challenges and Future Directions*. 178-192. Asian Development Bank & Cambridge University Press.
<http://dx.doi.org/10.1017/CBO> [9781316218587](https://doi.org/10.1017/CBO9781316218587) .
- ChinaPower. *How Much Trade Transits the South China Sea?*.
<https://chinapower.csis.org/much-trade-transits-south-china-sea/>. (Diakses pada 30 April 2025)
- Clinton, H. (2011). *America's Pacific century*. Foreign Policy.
<https://foreignpolicy.com/2011/10/11/americas-pacific-century/> (Diakses pada 21 April 2025).
- Columnist, ET (2023). *Largest Military Buildup In 20 Years, China Goes Unchecked In South China Sea As It Continues Illegal Expansion*.
<https://www.eurasiantimes.com/largest-military-buildup-in-20-years-china-goes-unchecked/#:~:text=China%20building%20an%20airstrip%20on,Sandy%20Cay%2C%20and%20Eldad%20Reef>.
- De Castro, R. C. (2017). *The Duterte administration's foreign policy: Unraveling the Aquino administration's balancing agenda on an emergent China*. Journal of Current Southeast Asian Affairs. 36(3). 139-159.
- De Castro, R. C. (2017). *The Duterte administration's foreign policy: Unraveling the Aquino administration's balancing agenda on an emergent China*. Journal of Current Southeast Asian Affairs. 36(3). 139-159.
- De Castro, R. C. (2024). *Exploring the Philippines' evolving grand*

- strategy in the face of China's maritime expansion: From the Aquino administration to the Marcos administration.* Journal of Current Southeast Asian Affairs. 43(1). 94-119. <https://doi.org/10.1177/18681034241234670>.
- Djelantik, S. (2015). Asia Pasifik: Konflik, Kerja Sama, dan Relasi Antarkawasan. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta. 144.
- Dupuy, F., & Dupuy, P.-M. (2013). A Legal Analysis of China's Historic Rights Claim in the South China Sea. *American Journal of International Law*, 107(1). 141. ISSN 0002-9300. Cambridge University Press (CUP). <https://doi.org/10.5305/amerjinlaw.107.1.0124>
- EIA (2013). *Overview: The South China Sea is a critical world trade route and a potential source of hydrocarbons, particularly natural gas, with competing claims of ownership over the sea and its resources.*
- Erickson, A. S., & Strange, A. M. (2014). Pandora's sandbox: China's island-building strategy in the South China Sea. *Foreign Affairs*. <https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2014-07-13/pandoras-sandbox>. (Diakses pada 30 April 2025)
- Erickson, A. S., & Wuthnow, J. (2016). Barriers, springboards and benchmarks: China conceptualizes the Pacific "Island Chains". *The China Quarterly*. 225. 13-15. doi:10.1017/S0305741016000011
- Ernst, M. (2021). Costs of Coercion: Predicaments of Chinese Statecraft in the Asia-Pacific. *Global Politics Review*. 7(1-2). 10. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4540509>
- Ernst, M. (2021). Costs of Coercion: Predicaments of Chinese Statecraft in the Asia-Pacific. *Global Politics Review*. 7(1-2). 10. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4540509>
- Fravel, M. T. (2012). *Chapter II: Maritime security in the South China Sea and the competition over maritime rights.* Dalam P. Cronin, (Eds.). *Cooperation from strength: The United States, China and the South China Sea*. 33-50. Center for a New American Security.
- Gao, Z., & Jia, B. B. (2013). The Nine-Dash Line in the South China Sea: History, Status, and Implications. *American Journal of International Law*. 107(1). 98-123. Cambridge University Press (CUP). <https://doi.org/10.5305/amerjinlaw.107.1.0098>
- Grossman, D. (2024). *How to Respond to China's Tactics in the South China Sea*. Rand.

- <https://www.rand.org/pubs/commentary/2024/06/how-to-respond-to-chinas-tactics-in-the-south-china.html>. (Diakses pada 30 April 2025)
- Heydarian, R. J. (2017). *The rise of Duterte: A populist revolt against elite democracy*. <http://dx.doi.org/10.1007/978-981-10-5918-6>
- Institute for China-America Studies. (2020). *Historical evidence is indispensable to China's South China Sea claims*. <https://chinaus-icas.org/research/historical-evidence-is-indispensable-to-chinas-south-china-sea-claims/> (Diakses pada 29 April 2025)
- International Crisis Group. (2024). *Philippines: Calming tensions in the South China Sea*. <https://www.crisisgroup.org/asia/south-east-asia/philippines-south-china-sea/philippines-calming-tensions-south-china-sea>. (Diakses pada 3 Mei 2025)
- International Institute for Strategic Studies. (2024). *The military balance 2024*. Routledge. 8.
- James Borton (2015). *Marine Peace Park Plan Offers Promise For South China Sea – Analysis*. Eurasiareview <https://www.eurasiareview.com/30102015-marine-peace-park-plan-offers-promise-for-south-china-sea-analysis/> (Diakses pada 30 April 2025)
- Jing, Y., & Li, J. (2019). *Who Owns Underwater Cultural Heritage in the South China Sea*. Coastal Management. 47(1), 107-126, ISSN 0892-0753. Informa UK Limited. <https://doi.org/10.1080/08920753.2019.1540908>
- Kaplan, R. D. & Myers J. J. (2014). *Asia's cauldron: The South China Sea and the end of a stable Pacific*. Carnegie Council for Ethics in International Affairs. 6-7. https://media-1.carnegiecouncil.org/import/studio/Asia%27s_Cauldron.pdf (Diakses pada 30 April 2025)
- Kent, G., & Valencia, M. Mark (1985). *Oil and Gas Potential, Overlapping Claims, and Political relations*. University of California Press. Berkeley. Hal 159.
- Kipgen, N. (2020). *The Politics of South China Sea Disputes*. Routledge India. <https://doi.org/10.4324/9781003026334>.
- Masters, J. (2024). *Timeline: China's maritime disputes*. Council on Foreign Relations. <https://www.cfr.org/timeline/chinas-maritime-disputes> (Diakses pada 29 April 2025)
- Mearsheimer, J.J. (2001). *The tragedy of great power politics*. New York: W.W. Norton & Company.
- Medcalf, R. (2020). *Indo-Pacific Empire: China, America and the Contest for the World's Pivotal Region*. Manchester

- University Press.
- Medcalf, R. (2020). *Indo-Pacific Empire: China, America and the Contest for the World's Pivotal Region*. Manchester University Press.
- Mercer, P. (2024). *Australia boosts Philippine military ties as South China Sea tensions rise*. VOA News. <https://www.voanews.com/a/australia-boosts-philippine-military-ties-as-south-china-sea-tensions-rise-/7598589.html> (Diakses pada 8 Agustus 2024)
- Ministry of Foreign Affairs of China (2025). China and the Philippines Hold the Tenth Meeting of the Bilateral Consultation Mechanism on the South China Sea. https://www.mfa.gov.cn/eng/xw/wjbxw/202501/t20250117_11537079.html. (Diakses pada 3 Mei 2025)
- Ministry of Foreign Affairs of China. (2016). *China Adheres to the Position of Settling Through Negotiation the Relevant Disputes Between China and the Philippines in the South China Sea*. https://www.mfa.gov.cn/eng/zy/gb/202405/t20240531_11367336.html. (Diakses pada 30 April 2025)
- Misalucha-Willoughby C. (2024). *Navigating turbulence at Second Thomas Shoal*. Carnegie Endowment for International Peace. <https://carnegieendowment.org/posts/2024/08/navigating-turbulence-at-second-thomas-shoal?lang=en>
- Morton, K. (2016). China's ambition in the South China Sea: is a legitimate maritime order possible?. *International Affairs*. 936-938. academic.oup.com. <https://doi.org/10.1111/1468-2346.12658>
- National Economic and Development Authority. (2023). *Op.Cit.* 18.
- National Economic and Development Authority. (2023). *Philippine Development Plan 2023-2028*. Republic of the Philippines. <https://pdp.neda.gov.ph/wp-content/uploads/2023/01/PDP-2023-2028.pdf>. (Diakses pada 30 April 2025)
- National Economic and Development Authority. *Loc.Cit.* 360.
- O'Rourke, R. (2024). *China naval modernization: Implications for U.S. Navy capabilities—Background and issues for Congress*. Congressional Research Service. <https://www.congress.gov/crs-external-products/RL/PDF/RL33153/RL33153.285.pdf> (Diakses pada 21 April 2025).
- O'Rourke, R. (2024). *China naval modernization: Implications for U.S. Navy capabilities—*

- Background and issues for Congress.* Congressional Research Service. https://www.congress.gov/crs_external_products/RL/PDF/RL33153/RL33153.285.pdf (Diakses pada 21 April 2025).
- Permanent Court of Arbitration (2016). *Press Release: The South China Sea Arbitration (The Republic of the Philippines vs The People's Republic of China*. Den Hag. 8-9.
- Philippine Statistics Authority. (2021). *Foreign trade statistics of the Philippines: 2020*. https://psa.gov.ph/system/files/main-publication/2020%2520FTS%2520Publication_signed-compressed.pdf. (Diakses pada 30 April 2025)
- Philippine Statistics Authority. (2025). *International Merchandise Trade Statistics of the Philippines 2024*. <https://psa.gov.ph/statistics/export-import/annual>. (Diakses pada 3 Mei 2025)
- Poling, Gregory; Natalegawa, Andreyka; & Fallin, Danielle (2023). *Building a U.S.-Japan-Philippines Triad*. CSIS. <https://www.csis.org/analysis/building-us-japan-philippines-triad> (Diakses pada 8 Agustus 2024)
- Reinsch, W. A. & Samuel R. (2025). *Rocking the boat: The Philippines trade strategy amid rising geoeconomic tensions*. Center for Strategic and International Studies. <https://www.csis.org/analysis/rocking-boat-philippines-trade-strategy-amid-rising-geoeconomic-tensions>. (Diakses pada 3 Mei 2025)
- Rudloff, Peter (2013). *Offensive Realism, Defensive Realism, and the Role of Constraints*. Arkansas Political Science Association. *The Midsouth Political Science Review*. 14. 45-46.
- Seymour, C. M. (2023). *Navigating The South China Sea: Analyzing the Current Dispute Over Sovereignty, Maritime Zones, and Maritime Rights*. *South Carolina Journal of International Law and Business*. scholarcommons.sc.edu.<https://scholarcommons.sc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1268&context=scjilb>
- Southerland, M. (2016). *China's Island building in the South China Sea: Damage to the marine Environment, Implications, and International Law*. U.S.-China Economic and Security Review Commission. 3.
- The Print. (2020). *What is nine-dash line? The basis of China's claim to sovereignty over South China Sea*. <https://theprint.in/theprint-essential/what-is-nine-dash->

- [line-the-basis-of-chinas-claim-to-sovereignty-over-south-china-sea/469403/](#) (Diakses pada 29 April 2025)
- TIME. (2016). *South China Sea: Where did China get its nine-dash line?* <https://time.com/4412191/nine-dash-line-9-south-china-sea/> (Diakses pada 29 April 2025)
- Toft, P. (2005). John J. Mearsheimer: An Offensive Realist Between Geopolitics and Power.. *Denmark. Journal of Intenational Relations and Development*. 8(4). 381-408. University of Copenhagen. <https://doi.org/10.1057/palgrave.ejird.1800065>
- U.S. Department of Defense. (2023). *Military and security developments involving the People's Republic of China 2023. Annual Report to Congress*. <https://media.defense.gov/2023/Oct/19/2003323409/-1/-1/1/2023-MILITARY-AND-SECURITY-DEVELOPMENTS-INVOLVING-THE-PEOPLES-REPUBLIC-OF-CHINA.PDF> (Diakses pada 21 April 2025).
- U.S. Energy Information Administration. (2022). *South China Sea regional analysis brief*. https://www.eia.gov/international/analysis/regions-of-interest/South_China_Sea (Diakses pada 28 April 2025).
- Zhao, S. (2014). *A new model of big power relations? China-US strategic rivalry and balance of power in the Asia-Pacific*. *Journal of Contemporary China*. 24(93).377-397.